

Kriteria Inti untuk Kemampuan Inisiatif Lanskap

Makalah posisi kolektif

Versi 1: Oktober 2024

Diterjemahkan: Oktober 2025

©Hendrik Cornelissen/Unsplash



Konteks

Inisiatif lanskap menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari wilayah geografis tertentu dalam rangka mengatasi prioritas tantangan keberlanjutan, seperti penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian, melalui pendekatan kolaboratif.

Kekuatan inisiatif lanskap terletak pada penyelarasan kepentingan dan prioritas para pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat lokal, praktisi, pelaku pasar, dan pemerintah daerah sehubungan dengan sasaran, tindakan, dan investasi bersama sehingga mereka lebih mampu membiayai dan menciptakan kondisi sistem yang diperlukan untuk mencapai dampak keberlanjutan jangka panjang pada skala lanskap.

Dengan meningkatnya minat dan keterlibatan dalam inisiatif lanskap¹, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang jelas, sederhana dan konsisten terhadap elemen-elemen inti dari inisiatif lanskap yang mapan.

Banyak organisasi praktisi lanskap² telah menyepakati kriteria inti dan sub-kriteria sebagaimana tersaji disini.

Kriteria ini menyajikan peta jalan bagi inisiatif lanskap yang baru dan yang sudah berjalan guna meningkatkan efektivitasnya, sekaligus panduan menilai kemampuan inisiatif-inisiatif ini untuk berbagai sasaran atau kasus penggunaan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini. Meskipun setiap inisiatif lanskap akan menempuh jalannya masing-masing untuk mengembangkan kriteria dan sub-kriteria tersebut seiring waktu, inisiatif yang sudah mapan dan telah memenuhi kriteria ini cenderung lebih tangguh, lebih menarik bagi para investor, dan lebih mampu menghasilkan dampak keberlanjutan yang lebih kuat serta berkelanjutan di tingkat lanskap.

Definisi



Lanskap

Sistem sosio-ekologi, yang didefinisikan oleh suatu wilayah geografis dengan karakteristik ekologi dan sosioekonomi yang sama dan saling berinteraksi. Suatu lanskap dapat digambarkan berdasarkan daerah aliran sungai, bentang laut, ekosistem, yurisdiksi, batas wilayah produktif, atau dengan cara lain.

Pendekatan Lanskap

Pendekatan pengelolaan yang menekankan pada kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk memajukan tujuan keberlanjutan bersama dan membangun ketahanan pada skala lanskap.

Inisiatif Lanskap

Inisiatif multi-pemangku kepentingan yang mengoperasionalkan pendekatan lanskap pada lanskap tertentu, dengan menetapkan tujuan bersama, mengambil tindakan kolektif sambil merekonsiliasikan berbagai kepentingan, dan memantau kemajuan menuju tujuan dan hasil keberlanjutan bersama pada skala lanskap.³

1. Silakan lihat [analisis CDP analisis peningkatan pengungkapan perusahaan](#) perihal keterlibatan lanskap.
2. Organisasi yang mendukung posisi ini tercantum di halaman depan.
3. Silakan lihat juga definisi inisiatif Kerangka Akuntabilitas perihal [definisi inisiatif lanskap](#).

Kriteria Inti

Inisiatif lanskap yang mapan dicirikan oleh empat kriteria inti yang menjadi bagian penting dari efektivitasnya. Kriteria inti dan sub-kriteria yang menyertainya dapat berfungsi sebagai peta jalan bagi pengembangan inisiatif lanskap agar selaras dari waktu ke waktu. Penerapan keempat kriteria inti ini juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengamanan, meminimalkan berbagai risiko yang terkait dengan proses dan tindakan pengambilan keputusan di lanskap, sekaligus meningkatkan dampak sosial dan lingkungan yang positif⁴.



1. Skala:

Inisiatif lanskap dijalankan pada skala wilayah yang memiliki batas ekologi, sosial ekonomi, atau administratif yang jelas, misalnya pada tingkat daerah aliran sungai (DAS) atau batas yurisdiksi pemerintahan.



2. Proses atau platform tata kelola multi-pemangku kepentingan⁵:

Inisiatif lanskap ini dikelola melalui proses atau platform multi-pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif tersebut⁶.



3. Sasaran dan aksi kolektif⁷:

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif lanskap telah menyepakati serangkaian tujuan dampak keberlanjutan jangka panjang pada skala lanskap, serta rencana aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut⁸.



4. Pemantauan Kolektif⁹:

Inisiatif lanskap mengelola kerangka pemantauan dan pelaporan bersama yang memungkinkan penilaian serta komunikasi atas kemajuan menuju pencapaian tujuan dampak keberlanjutan bersama dari inisiatif tersebut.

4. Silakan lihat bagian sub-kriteria untuk contoh yang lebih rinci mengenai peran-peran perlindungan.

5. Untuk peta komprehensif proses dan platform tata kelola multi-pemangku kepentingan silakan lihat [Peta lanskap inisiatif C DP/TFA](#)

6. Apabila berbagai lembaga atau pemangku kepentingan bertanggung jawab terhadap berbagai aksi dalam suatu lanskap, mungkin ada beberapa proses atau platform yang mendukung penerapan, namun semuanya harus diselaraskan dalam kerangka kerja umum.

7. Silakan lihat juga [makalah 1 posisi gabungan perihal 'apa yang merupakan tindakan/investasi yang kredibel'](#) dari Kelompok Kerja Praktisi Lanskap.

8. Dampak yang bermakna pada skala lanskap hanya dapat tercapai melalui upaya terkoordinasi para pemangku kepentingan utama dalam jangka panjang, dengan komitmen setidaknya 5 hingga 10 tahun.

9. Silakan lihat juga [makalah 4 posisi gabungan terhadap pemantauan kolektif](#) dari Kelompok Kerja Praktisi Lanskap.

Sub-kriteria

Sub-kriteria memberikan definisi yang lebih mendalam terhadap kriteria inti dan menunjukkan inisiatif lanskap yang mapan serta berkualitas tinggi. Sub-kriteria ini menggambarkan kondisi yang diperlukan agar inisiatif tersebut dapat berjalan secara efektif. Setiap inisiatif lanskap akan berkembang menuju kemapanan melalui jalur yang berbeda-beda, dan sub-kriteria ini berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung proses tersebut.



1. Skala:

Inisiatif lanskap dijalankan pada skala wilayah yang memiliki batas ekologi, sosial ekonomi, atau administratif yang jelas, misalnya pada tingkat daerah aliran sungai (DAS) atau batas yurisdiksi pemerintahan.

Inisiatif Lanskap biasanya beroperasi pada skala ratusan ribu hektar tetapi sering kali dapat lebih besar atau terkadang lebih kecil, tergantung pada konteks lanskap.

Inisiatif lanskap memiliki skala yang:

- Dapat mempengaruhi kondisi sistemik yang

mendasari sasaran keberlanjutan, seperti melalui perencanaan penggunaan lahan atau reformasi kebijakan¹⁰; dan

- Memungkinkan pengelolaan wilayah yang terpadu dan selaras melalui proses tata kelola multipihak.



2. Proses atau Platform tata kelola multi-pemangku kepentingan

Inisiatif lanskap ini dikelola melalui proses atau platform multi-pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif tersebut⁶.

Proses atau platform multi-pemangku kepentingan:

- Mencakup partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan utama¹¹ pada lanskap, termasuk perwakilan masyarakat setempat secara khusus;
- Menetapkan atau memfasilitasi definisi tujuan dan tindakan kolektif dari inisiatif¹²;
- Terlibat langsung dengan pemerintah daerah dan berupaya menyelaraskan dengan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah, subnasional, atau nasional yang progresif;

- Memiliki prosedur operasi dan pengambilan keputusan yang jelas dan transparan yang mendukung partisipasi pemangku kepentingan yang efektif;
- Memainkan peran koordinasi untuk tindakan dan pemantauan di lanskap; dan
- Menerapkan perlindungan, termasuk mekanisme pengaduan, yang meminimalkan risiko dampak negatif terhadap hak asasi manusia atau lingkungan, sekaligus meningkatkan hasil positif bagi manusia dan alam dalam lanskap¹³.

10. Lanskap dengan skala yang memadai juga membantu melindungi dari kebocoran atau praktik buruk yang beralih ke rantai pasokan yang kurang terlihat.

11. Kelompok pemangku kepentingan utama dapat mencakup pemerintah daerah dan regional, LSM dan/atau masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat adat, produsen, pelaku pasar lainnya, dan lembaga keuangan.

12. Silakan lihat [3. Sasaran dan aksi kolektif](#).

13. Sifat partisipatif dari proses multi-pemangku kepentingan berfungsi sebagai perlindungan sosial inti yang mendukung mitigasi dan pengurangan risiko secara keseluruhan.



3. Sasaran dan aksi kolektif:

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif lanskap telah menyepakati serangkaian tujuan dampak keberlanjutan jangka panjang pada skala lanskap, serta rencana aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan keberlanjutan:

- Berdasarkan analisis konteks atau upaya serupa untuk memahami kondisi terkini lanskap serta prioritas tindakan para pemangku kepentingan;
- Mencakup prioritas sosial, lingkungan, dan ekonomi¹⁴;
- Masing-masing disertai dengan metrik yang terukur, data dasar, dan tonggak pencapaian jangka pendek dan jangka menengah; dan
- Ditinjau secara berkala dan direvisi seperlunya untuk mencerminkan konteks lanskap yang berubah.

Rencana aksi kolektif:

- Mengatasi masalah sistemik dengan berfokus pada solusi jangka panjang yang dapat terintegrasi dalam tata kelola lokal;
- Mempertimbangkan keragaman jenis penggunaan lahan dan komoditas yang ada di dalam lanskap;
- Merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong kemajuan menuju sasaran keberlanjutan;
- Tersedia secara terbuka untuk publik dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan yang terlibat¹⁵;
- Diperbaharui secara berkala untuk mencerminkan kemajuan dan pendanaan; dan
- Disertai strategi keuangan atau pendanaan¹⁶.



4. Pemantauan kolektif:

Inisiatif lanskap mengelola kerangka pemantauan dan pelaporan bersama yang memungkinkan penilaian serta komunikasi atas kemajuan menuju pencapaian tujuan dampak keberlanjutan bersama dari inisiatif tersebut.

Kerangka pemantauan kolektif mencakup:

- Sebuah penilaian kinerja dasar yang telah divalidasi secara lokal¹⁷ terhadap kondisi ekologi dan sosial ekonomi di wilayah lanskap tersebut;
- Pemantauan aktivitas yang menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi;
- Pemantauan kinerja pada skala lanskap berdasarkan metrik kinerja dan tonggak capaian yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama; dan
- Pelaporan data aktivitas dan kinerja yang kuat dan transparan.

14. Keseimbangan antara ketiga pilar ini akan bergantung pada hasil analisis konteks dan prioritas para pemangku kepentingan yang berpartisipasi.

15. Transparansi terhadap sasaran dan rencana aksi mendukung kesadaran dan penerimaan terhadap inisiatif lanskap, juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan.

16. Strategi keuangan memperkuat argumen kepada perusahaan dan investor tentang dampak potensial dan daya tahan jangka panjang investasi mereka. Rencana tindakan juga dapat disertai dengan dokumen penerapan lainnya seperti rencana bisnis, strategi pemasaran, rencana komunikasi, dll.

17. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan lokal dalam proses penilaian akan membantu memastikan bahwa perspektif dan data yang relevan menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan tindakan kolektif serta pemantauan lebih lanjut. Validasi dasar oleh pihak ketiga membantu memastikan akurasi dan keandalan.

Kasus Penggunaan

Kriteria inti dan sub-kriteria berlaku setara pada beragam kasus penggunaan:



A. Peningkatan:

Sebagai panduan tingkat tinggi bagi inisiatif lanskap sehubungan dengan elemen-elemen utama yang dapat meningkatkan kualitas, ketangguhan, keberlanjutan, dan dampaknya, sekaligus menjadi alat untuk menilai kesenjangan bagi organisasi yang mendanai atau mendukung inisiatif tersebut.



D. Investasi:

Sebagai sarana untuk menunjukkan peluang bagi berbagai jenis investasi sekaligus mengurangi risiko investasi berdasarkan tingkat keamanan dan/atau ketangguhan lanskap serta membangun kepercayaan terhadap inisiatif lanskap sebagai tema investasi yang terpadu



B. Penilaian:

Sebagai kerangka kerja pelaporan dan pengungkapan dalam menilai kualitas dan keamanan inisiatif yang dilaporkan baik perusahaan atau pemerintah¹⁸, atau dalam memvalidasi keamanan suatu inisiatif agar dapat diperlihatkan kepada calon pendonor atau investor¹⁹.



E. Keterlibatan:

Agar perusahaan dalam rantai pasok, investor, dan pemerintah memiliki keyakinan untuk berkolaborasi dengan inisiatif lanskap, sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendanaan dari sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama²¹.



C. Klaim:

Sebagai prasyarat yang mendukung klaim yang kuat mengenai suatu inisiatif, misalnya untuk memastikan keterlibatan perusahaan dalam inisiatif lanskap disampaikan secara kredibel, atau ketika suatu investasi lanskap dinilai berkontribusi terhadap pencapaian target perusahaan²⁰.



F. Pembelajaran:

Menyediakan kerangka perancangan menyeluruh dengan tujuan membangun bahasa bersama untuk membahas inisiatif lanskap, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara model konseptual, kebijakan publik, dan penerapan praktis dari inisiatif lanskap.

18. Sebagai contoh, [kerangka kerja pengungkapan CDP](#) menggunakan kriteria ini dalam menilai kualitas dan kredibilitas lanskap dan inisiatif yurisdiksi yang diungkapkan.

19. Sebagai contoh, [LandScale](#) dan [SourceUp](#) memiliki platform daring yang memungkinkan inisiatif lanskap untuk memperlihatkan kemajuan mereka yang selaras dengan kriteria ini dan, dalam kasus LandScale, guna memvalidasi data mereka.

20. Sebagai contoh, SBTN menggunakan kriteria ini untuk memandu perusahaan dalam penetapan target keterlibatan lanskap. [Science Based Targets Network](#) (2024). Langkah 3: Ukur, Tetapkan, Ungkap: Land (v1.0).

21. Sebagai contoh, Kelompok Kerja Koalisi Positif Hutan Lanskap telah mengembangkan cetak biru menggunakan kriteria inti yang bertujuan untuk memperkuat keselarasan dengan [Prinsip Aksi Koletif \(slide 22\)](#) dalam inisiatif yang didukung oleh para anggota koalisi.